

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia, yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengusahakan untuk mencerdaskan kehidupan pendidikan nasional. Sebagai perwujudan cita-cita nasional tersebut telah diterbitkan dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang itu menjelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa serta bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Menurut Zuriyah (2007:15) Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikat pendidikan yang memberdayakan.
5. Pendekatan koprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. Pelaksanaan wajib belajar.
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
11. Pemberdayaan peran serta masyarakat.
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat.
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerangka dasar strategi dan arah pendidikan yang jelas diharapkan mutu pendidikan di Indonesia semakin meningkat dan tidak terus-menerus terpuruk seperti saat ini.

Menurut Zuriah (2007:10) Tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan budi pekerti ataupun pendidikan moral, terutama didasarkan pertimbangan 3 hal sebagai berikut: “Melemahnya ikatan keluarga serta kecenderungan negatif di dalam kehidupan remaja dan suatu kebangkitan kembali dari perlunya nilai-nilai etik, moral, dan budi pekerti”.

Dalam mencapai harapan dan cita-cita di atas, tugas guru pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat krusial dan menentukan dalam pembinaan moral siswa.

Hadi (2002:21) mengatakan bahwa: “Dewasa ini pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan melalui pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) dan pendidikan agama akan tetapi masih tampak kurang pada keterpaduan dalam model dan strategi dan pembelajaran”.

Pembinaan moral dalam lingkungan sekolah dapat dilihat dari bagaimana menjaga hubungan yang sangat vital antara pengetahuan dan tindakan. Moral muncul disaat seorang berpikir tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Moral melibatkan pengujian terhadap berbagai sikap dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Moral menyangkut masalah mengenai

keputusan-keputusan yang berkaitan dengan apa yang ada pada diri seseorang tersebut.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter baik serta setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pembinaan moral dilakukan dengan cara menanamkan nilai moral yang tercakup dalam Pancasila atau berusaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak ini berwujud moralitas atau kesusilaan yang berisi nilai-nilai dan kehidupan yang berada dalam masyarakat.

Pembinaan moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya dapat diusahakan supaya guru PKn menjadi orang yang baik bagi penumbuhan dan pengembangan mental dan moral anak didik, di samping tempat pemberian pengetahuan, pendidikan keterampilan dan pengembangan bakat dan kecerdasan. Dengan kata lain, supaya sekolah atau khususnya guru PKn merupakan lapangan sosial bagi anak, di mana pertumbuhan mental, moral, sosial dan segala aspek kepribadian dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan pada fungsi tersebut, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus dinamis dan mampu menarik perhatian peserta didik. Guru PKn merupakan orang yang dapat membawa anak didik kepada pembinaan mental sehat, moral yang tinggi dan pengembangan bakat, sehingga anak itu dapat lega dan tenang dalam pertumbuhannya dan jiwanya tidak goncang. Kegoncangan jiwa dapat menyebabkan mudah terpengaruh oleh tingkah laku yang kurang baik.

Dengan demikian, sebagai guru PKn jangan hanya mementingkan prestasi tanpa dibarengi dengan peningkatan akhlak yang bermoral. Oleh karena itu, sebagai guru PKn peningkatan perestasi harus dibarengi dengan peningkatan akhlak dan penanaman nilai dan moral. Sebagai guru PKn harus memperhatikan dalam membina nilai moral dari siswa itu harus betul-betul menerapkan pengertian, maksud, isi Pancasila itu dan bagaimana menjadikannya sebagai pandangan hidup dan pengendalian diri dari setiap tindakan dan perbuatan kita. Apabila Pancasila telah dimengerti dan didudukkan dalam fungsi pengendali tingkah laku anak didik, maka pelaksanaan nilai moral dari Pancasila itu dalam hidup harus dimengerti dan diketahui. Usaha guru PKn dalam membina siswa menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, hendaknya nilai moral dari Pancasila itu betul-betul diketahui oleh setiap siswa. Maka peranan guru dalam pemberian mata pelajaran PKn dapat membantu dan membina moral siswa dalam arti pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan nilai moral Pancasila dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang utama untuk dapat mengendalikan tingkah laku demi ketenteraman hidup, tetapi di SMA Negeri 1 Kotanopan menurut pengamatan penulis tidak sepenuhnya seperti dinyatakan di atas ditandai dengan masih adanya siswa yang terlambat masuk sekolah, masih ada siswa yang tidak tepat waktu mengumpul tugas, siswa yang membolos, bahkan kurang menghargai guru.

Hal ini disebabkan pemahaman dan penerapan norma-norma yang berlaku di sekolah belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik, inilah yang menjadi alasan penulis memberi judul “peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembinaan moral siswa kelas X SMA Negeri 1 Kotanopan Tahun Pelajaran 2012/2013”.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Poerwadarminta (2000:294) mengatakan bahwa: “identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas, masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan”. Jadi identifikasi masalah adalah menentukan suatu menetapkan sesuatu yang harus dipecahkan mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan maka harus diberi penyelesaian.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan jelas tujuannya maka perlu dipaparkan identifikasi masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pembinaan moral siswa
2. Kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam upaya penanaman moral siswa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Respon siswa terhadap materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan karena mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini, sesuai yang dikemukakan Nasution (2007:20) berikut ini:

Analisis masalah juga membatasi ruang lingkup masalah. Di samping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah. Lagi pula dengan demikian kita peroleh gambaran yang jelas, apabila penelitian itu dapat dianggap selesai dan berakhir. Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah bagi penyelidik tetapi juga untuk dapat menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk pemecahannya.

Maka untuk mempermudah penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pembinaan moral siswa.
2. Perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

D. Rumusan Masalah

Dalam buku pedoman penulisan skripsi Unimed (2006:11), menyatakan: “Perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian merupakan perumusan format yang operasional dari masalah yang diteliti, isi masalah harus konsisten sesuai dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah”.

Berdasarkan pernyataan pedoman di atas maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan moral siswa?
2. Bagaimana Perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

E. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan hal yang lazim bagi setiap orang yang melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan tujuan apa yang hendak dicapai, sebab tanpa tujuan segala yang dilakukan akan membawa hasil yang sia-sia. Lebih lanjut seperti dikemukakan Nasution (2007:17) berikut ini:

Tiap penelitian harus mempunyai tujuan –tujuan yang harus dicapai. Tujuan bertalian erat dengan masalah yang dipilih serta analisis masalah itu. tidak ada ketentuan berapa banyak tujuan harus dicapai dalam suatu tesis. Banyak tujuan dapat mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

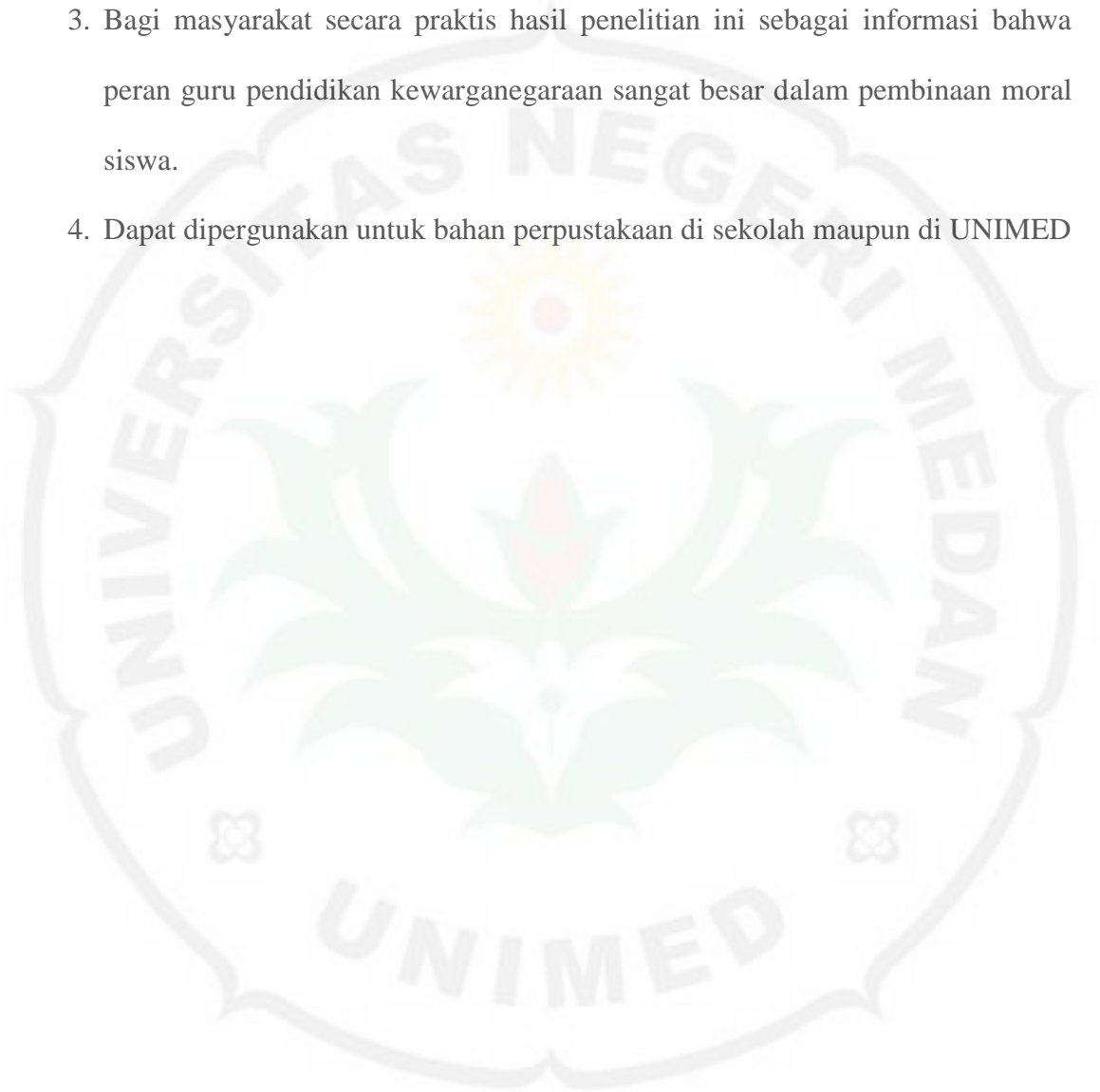
1. Untuk mengetahui peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembinaan moral siswa.
2. Untuk mengetahui Perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara akademik untuk menambah dan mengembangkan khasanah keilmuan peneliti dalam hal pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan moral.
2. Secara teoritis dapat menambah wawasan dan informasi bagi guru-guru dan calon guru dalam membina moral siswa.

3. Bagi masyarakat secara praktis hasil penelitian ini sebagai informasi bahwa peran guru pendidikan kewarganegaraan sangat besar dalam pembinaan moral siswa.
4. Dapat dipergunakan untuk bahan perpustakaan di sekolah maupun di UNIMED



THE
Character Building
UNIVERSITY